

# Kartu Pra Kerja Disebut Beban Keuangan Negara,

Ini Kata Jokowi

Reporter: **Caesar Akbar**

Editor: **Martha Warta Silaban**

Senin, 11 Maret 2019 06:00 WIB



*Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) meninjau kebun karet usai Silaturahmi Bersama Petani di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu, 9 Maret 2019. ANTARA*

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menjawab tuduhan berbagai pihak ihwal [Kartu Pra Kerja](#) yang digagasnya dinilai bisa membebani keuangan negara. Menurut dia program tersebut diperlukan lantaran dalam lima tahun ke depan pemerintah hendak berfokus membangun sumber daya manusia secara besar-besaran.

BACA: [Perkenalkan Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran](#)

"Bagaimana kita mau bertarung di kompetisi dengan negara lain kalau SDM kita skillnya kurang, kalau SDM premium kita tidak melimpah," ujar Jokowi selepas bertemu ratusan pendukungnya dalam acara Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.

Kartu Pra Kerja, kata Jokowi, dikeluarkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Ia berkaca dari berbagai negara yang terjebak di kelas menengah dan tidak bisa naik menjadi negara maju lantaran infrastruktur dan sumber daya manusianya tidak siap. "Pelajaran itu harus kita ambil sebagai pengalaman."

BACA: [Pro Kontra Kartu Pra Kerja Jokowi](#)

Jadi, dia menegaskan Kartu Prakerja tidak bakal merugikan negara. Alih-alih, kartu sakti itu bisa membawa manfaat bagi Tanah Air. "Merugikan bagaimana, ini lho, kartu pra kerja kan, jadi nanti lulusan SMA SMK atau SMP atau universitas ini setelah pegang kartu ini bisa ditraining.," tutur Jokowi.

Pelatihan itu nantinya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, swasta, atau kementerian dan lembaga. Selain itu, pelatihan dapat dilakukan dalam jumlah banyak, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu pra kerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra Kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Bada Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.

Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.

Baca berita tentang [Kartu Pra Kerja](#) lainnya di *Tempo.co*.

FRANCISCA CHRISTY

**Kubu Prabowo Nilai**

## **Kartu Prakerja Jokowi Tak Masuk Akal**

CNN Indonesia | Senin, 11/03/2019 09:30 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaeen menilai kartu prakerja yang dijanjikan Presiden sekaligus capres nomor urut 01 Joko Widodo tak masuk akal.

Ferdinand menganggap tak masuk akal karena dengan kartu tersebut pengangguran atau orang yang belum mendapat kerja bakal menerima insentif dari pemerintah.

"Menurut saya menggaji pengangguran itu sangat tidak masuk akal," ujar Ferdinand kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (11/3).

Menurut Ferdinand, janji Jokowi tersebut tidak rasional dan berlebihan jika melihat struktur APBN selama ini. Akan sulit jika nantinya pemerintah memasukkan program kartu prakerja bersama KIP kuliah dan kartu sembako murah ke dalam APBN.

"Itu di luar batas nalar berpikir melihat dari struktur APBN kita selama ini, yang mana itu berat. Untuk menggaji honorer saja APBN kita saja terbentur, bahkan sering terlambat," ujar Kepala Divisi dan Advokasi Hukum Partai Demokrat ini.

**Lihat juga:** [Pemegang Kartu Prakerja Jokowi Dapat Jatah Honor Pengangguran](#)

Ferdinand menilai, jika dibandingkan dengan honorer, maka kartu prakerja ini akan menimbulkan ketidakadilan. Ferdinand memberi contoh, jika orang-orang yang belum bekerja mendapat gaji Rp200-300 ribu, maka para honorer akan iri.

"Nah ini pengangguran mau digaji berapa? Kalau gaji sama, maka para honorer bisa minta berhenti saja. Kalau Rp200 ribu tentu ini menimbulkan ketidakadilan, karena honorer yang kerja mati-matian digaji Rp300 ribu, bedanya cuma Rp100 ribu," ucap Ferdinand.

"Nah kalau digaji Rp100 ribu, uang itu bisa digunakan untuk apa? Ini yang kita lihat, tinggal masyarakat menentukan apa program itu masuk akal untuk dilaksanakan atau hanya sekadar janji untuk menarik suara," kata dia.

**Lihat juga:** [Jusuf Kalla Mengaku Belum Tahu soal Ide Kartu Prakerja](#)

Sebelumnya Jokowi menegaskan pemegang kartu prakerja akan mendapatkan honor dalam kurun waktu tertentu selama yang bersangkutan belum bekerja atau menganggur. Kartu prakerja merupakan bagian program baru Jokowi, selain kartu KIP Kuliah dan

kartu sembako murah.

Jokowi tak menjelaskan berapa besaran honor yang bakal diterima oleh para pemegang kartu prakerja, begitu pun dengan mekanisme pengalokasian dananya.

Yang jelas kartu prakerja tersebut digunakan untuk mengikuti pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

**Lihat juga:** [BPN Sebut Janji Kartu Jokowi Gombal dan Palsu](#)

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate menyebut penganggaran untuk program kartu prakerja akan diupayakan agar masuk ke dalam APBN 2020.

"Apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020," kata Plate di kompleks parlemen, Rabu (6/3) lalu. (osc/osc)